

PUSAT PEMBINAAN PROFESI KEUANGAN



PENDIDIKAN PROFESIONAL LANJUTAN BAGI AKTUARIS
YOGYAKARTA, 20 APRIL 2017

STRUKTUR KEMENTERIAN KEUANGAN



TUGAS & FUNGSI PPPK

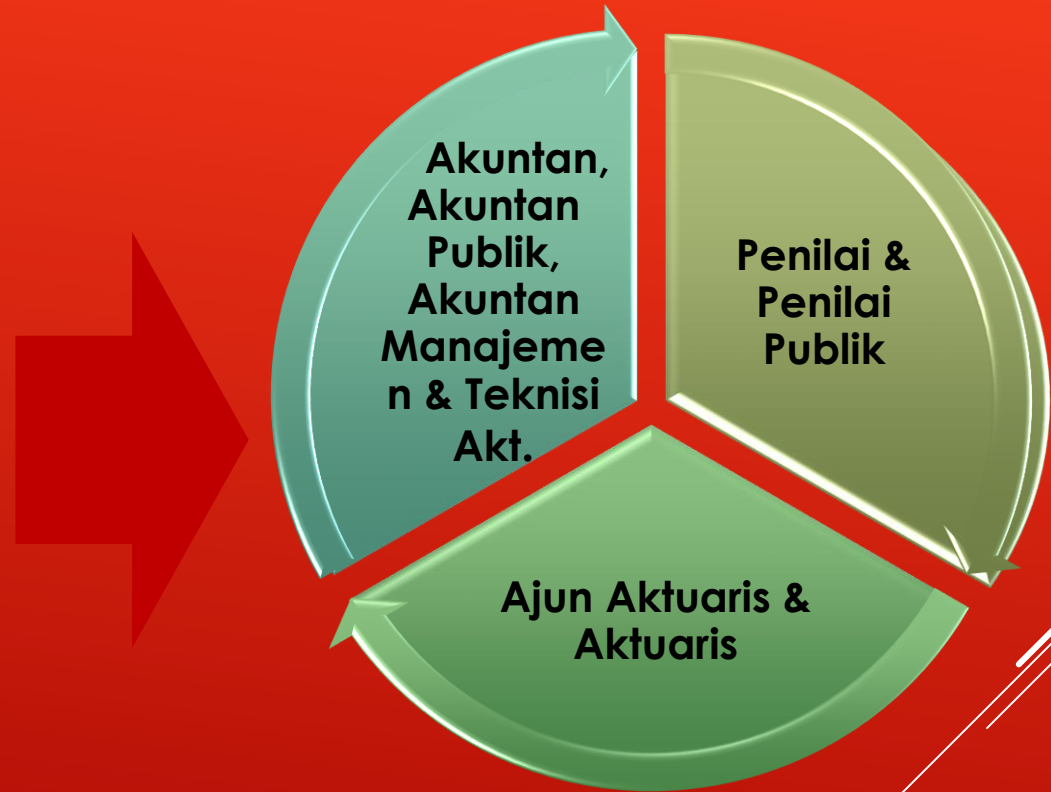
1. Perumusan kebijakan

2. Perizinan

3. Pembinaan

4. Pengawasan

5. Penyajian informasi



VIDEO PROFIL PUSAT PEMBINAAN PROFESI KEUANGAN



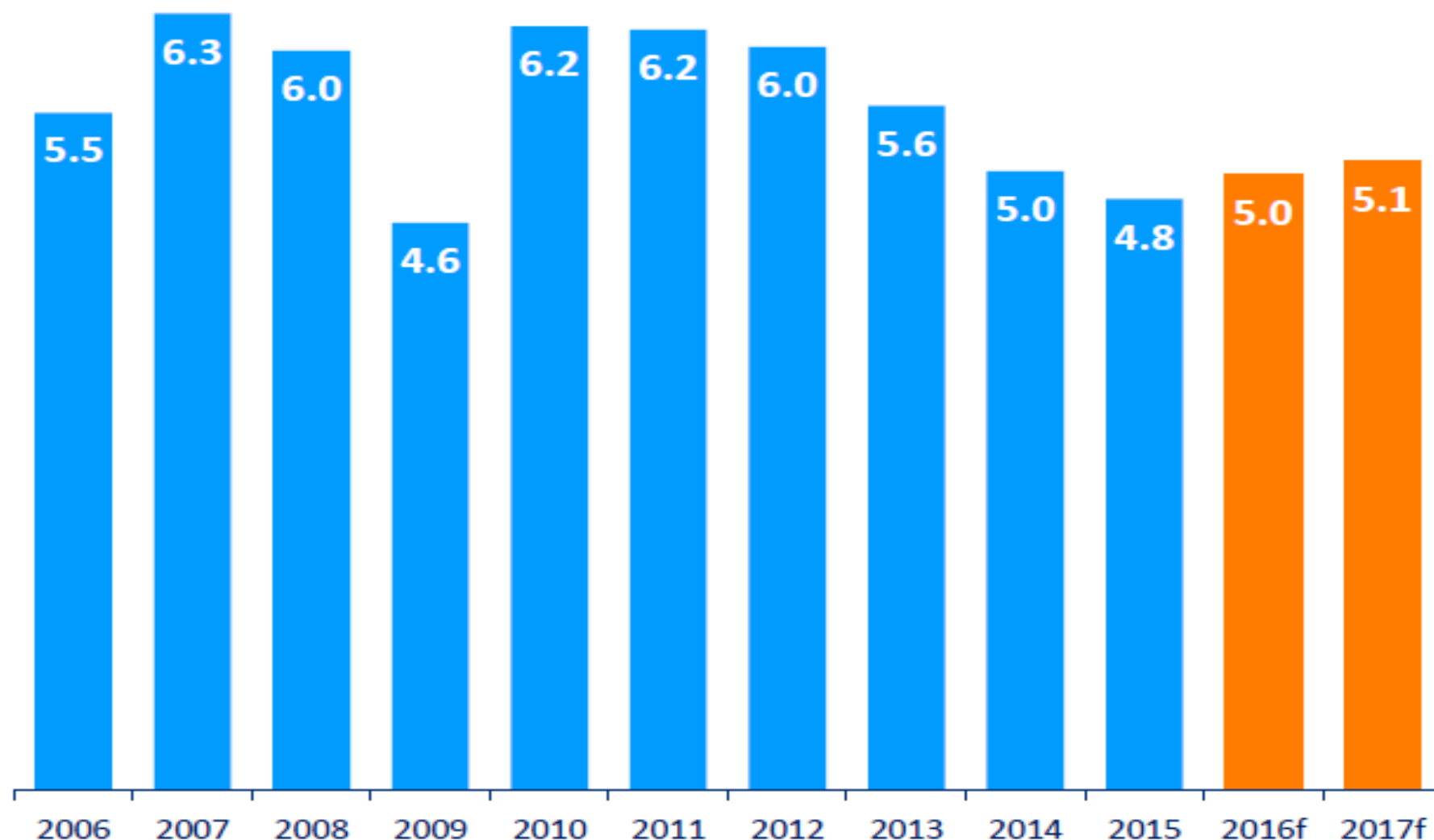
KEMENTERIAN KEUANGAN



PROSPEK PEREKONOMIAN INDONESIA 2017

PERTUMBUHAN EKONOMI INDONESIA

cukup berdaya tahan di tengah berbagai gejolak



Proyeksi pertumbuhan ekonomi 2017 oleh berbagai lembaga:

Bank Indonesia
5,0% - 5,4%

IMF
5,1%

World Bank
5,3%

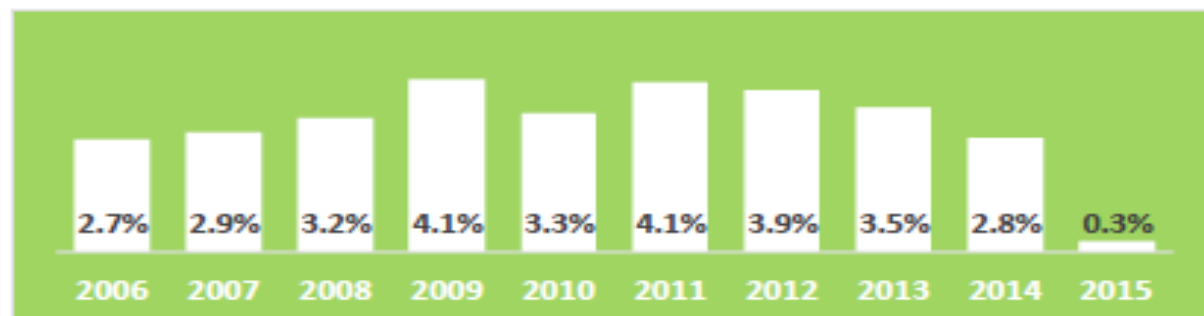
Consensus Forecast
5,2%



PERTUMBUHAN PDB BERDASARKAN SISI PRODUKSI

Didukung pertumbuhan sektor jasa yang terus tumbuh tinggi

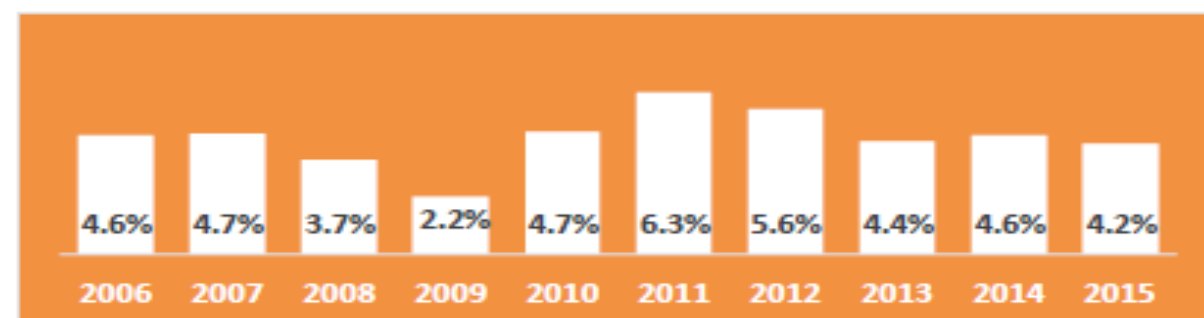
PRIMER



Pertanian, Pertambangan, Perikanan
Distribusi terhadap PDB 2006 - 2015: **23,6%**

- Dipengaruhi oleh harga dan perdagangan **komoditas dunia** yang saat ini cenderung lemah
- Dominan di beberapa daerah (Kalimantan, Papua, Sumatera)

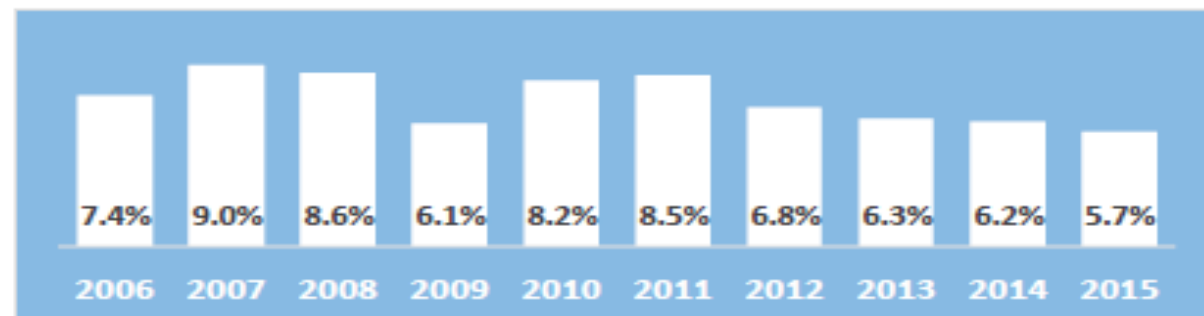
SEKUNDER



Industri Pengolahan
Distribusi terhadap PDB: **22,0%**

- Diharapkan terus membaik seiring dengan reformasi struktural
- Sektor unggulan **padat karya** yang memiliki nilai tambah yang tinggi
- Sektor yang memiliki porsi tertinggi dalam PDB

TERTIER

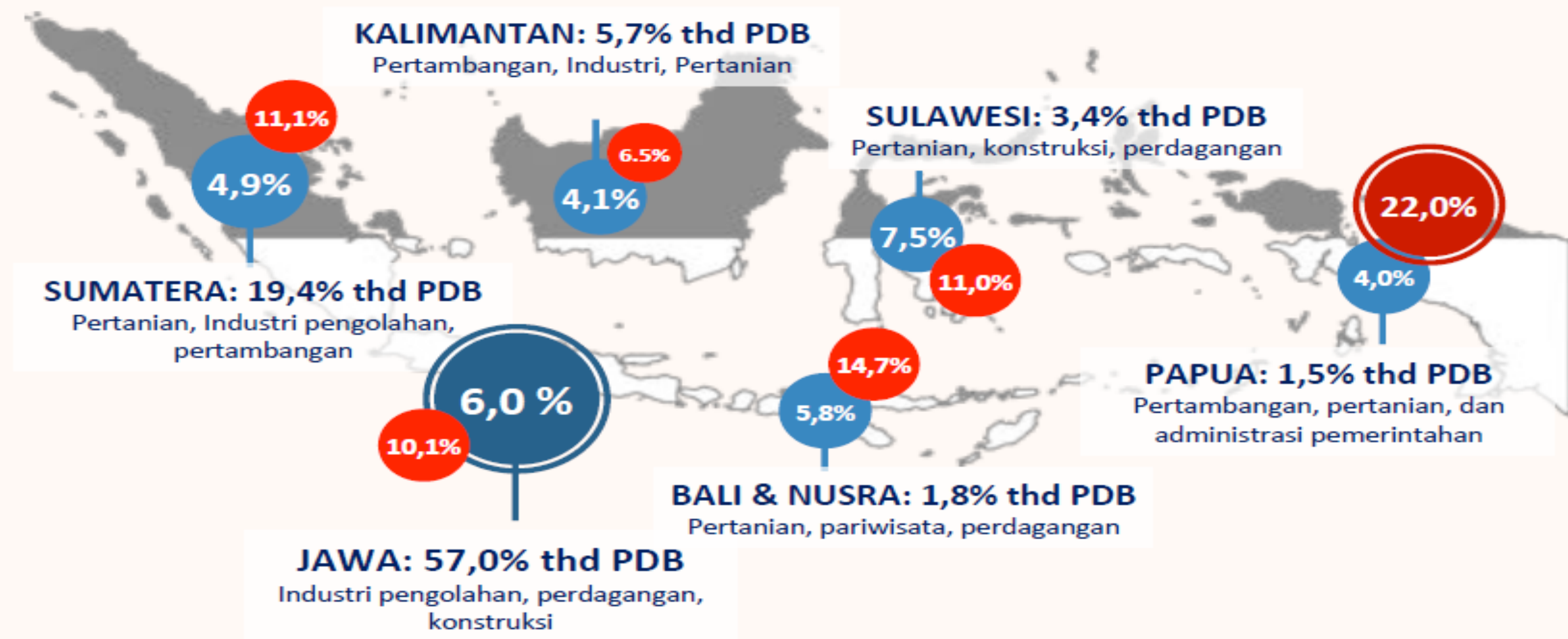


Sektor Jasa (terbagi dalam 14 sektor)
Distribusi terhadap PDB: **51,9%**

- **Tumbuh relatif tinggi dan stabil** dalam beberapa tahun terakhir
- Top pertumbuhan rata-rata sektor: **Informasi & Komunikasi, Jasa Keuangan & Asuransi, Transportasi & Pergudangan,**



Meski Ekonomi Tumbuh Tinggi DISPARITAS ANTAR DAERAH MASIH LEBAR



Pertumbuhan PDRB, rata-rata 2006-2015, YoY
Source: BPS



Tingkat Kemiskinan Daerah, per September 2016
Source: BPS

TANTANGAN DALAM MEWUJUDKAN MASYARAKAT ADIL & MAKMUR

Mengentaskan Kemiskinan



Pertumbuhan yang Inklusif dan Berkualitas

Meningkatkan Produktivitas



Meningkatkan Daya Saing



Mengurangi Ketimpangan



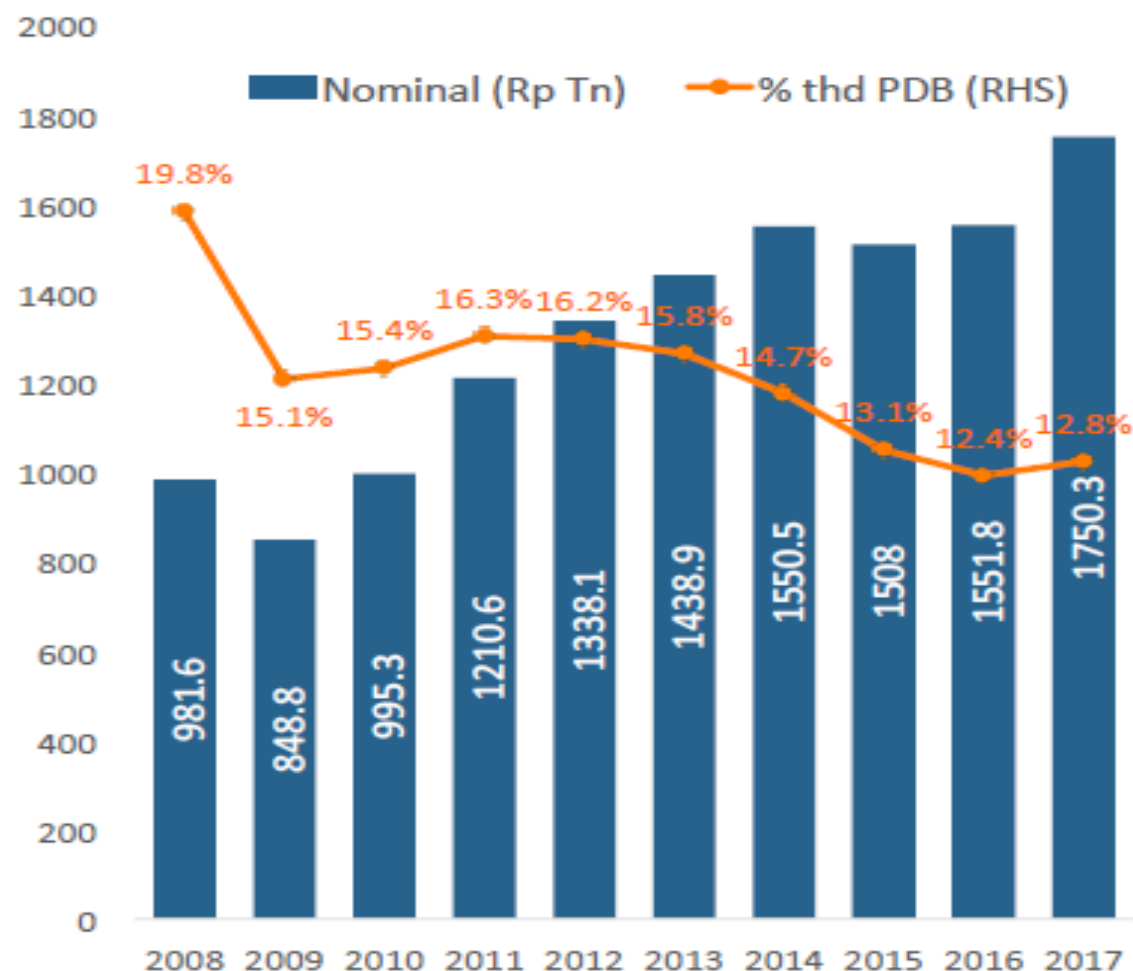
Tata kelola yang baik Institusi yang bersih & efektif



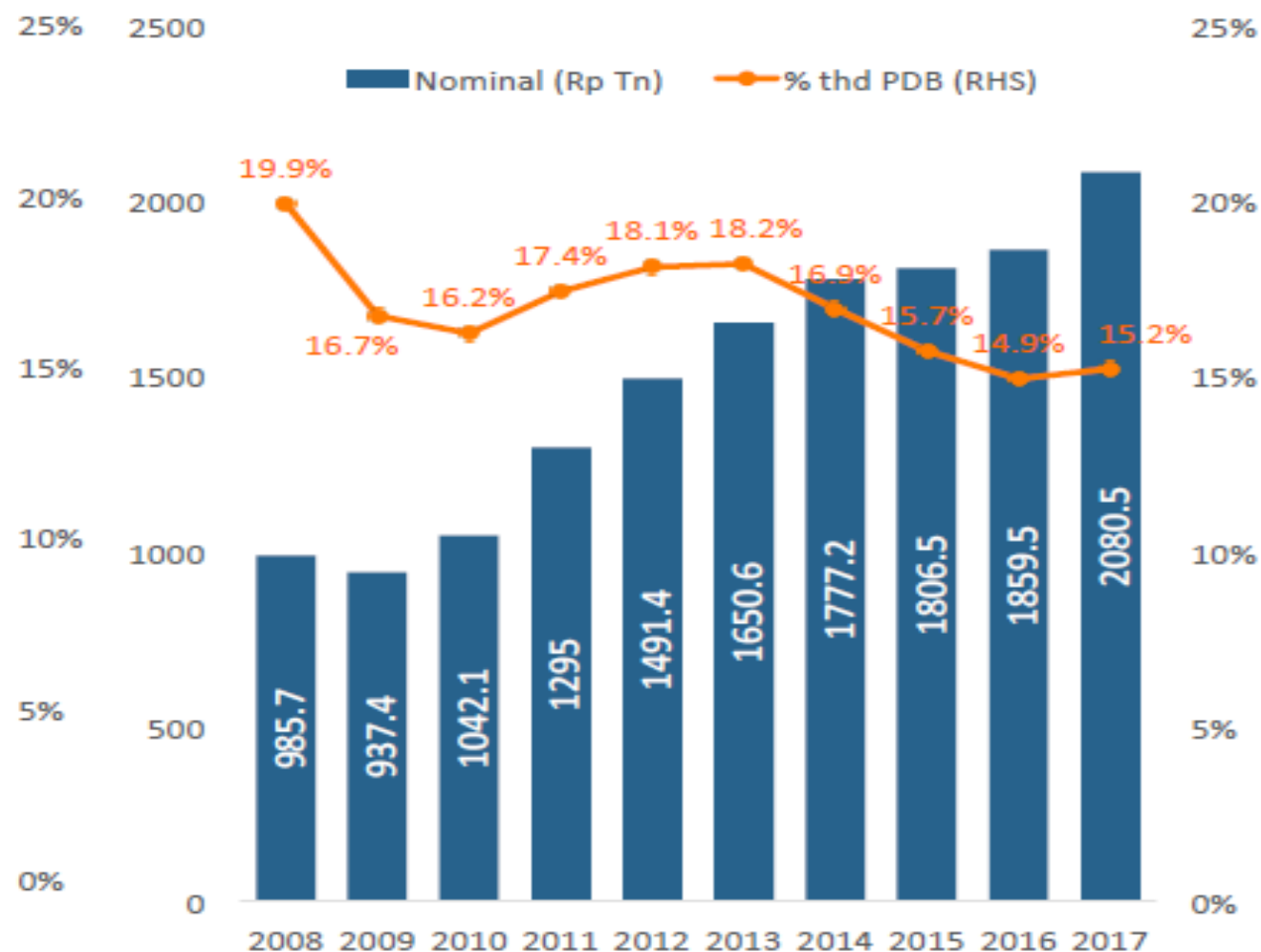
APBN MERUPAKAN INSTRUMEN PEMBANGUNAN

Memiliki peran sentral dalam mendorong pertumbuhan

Pendapatan Negara



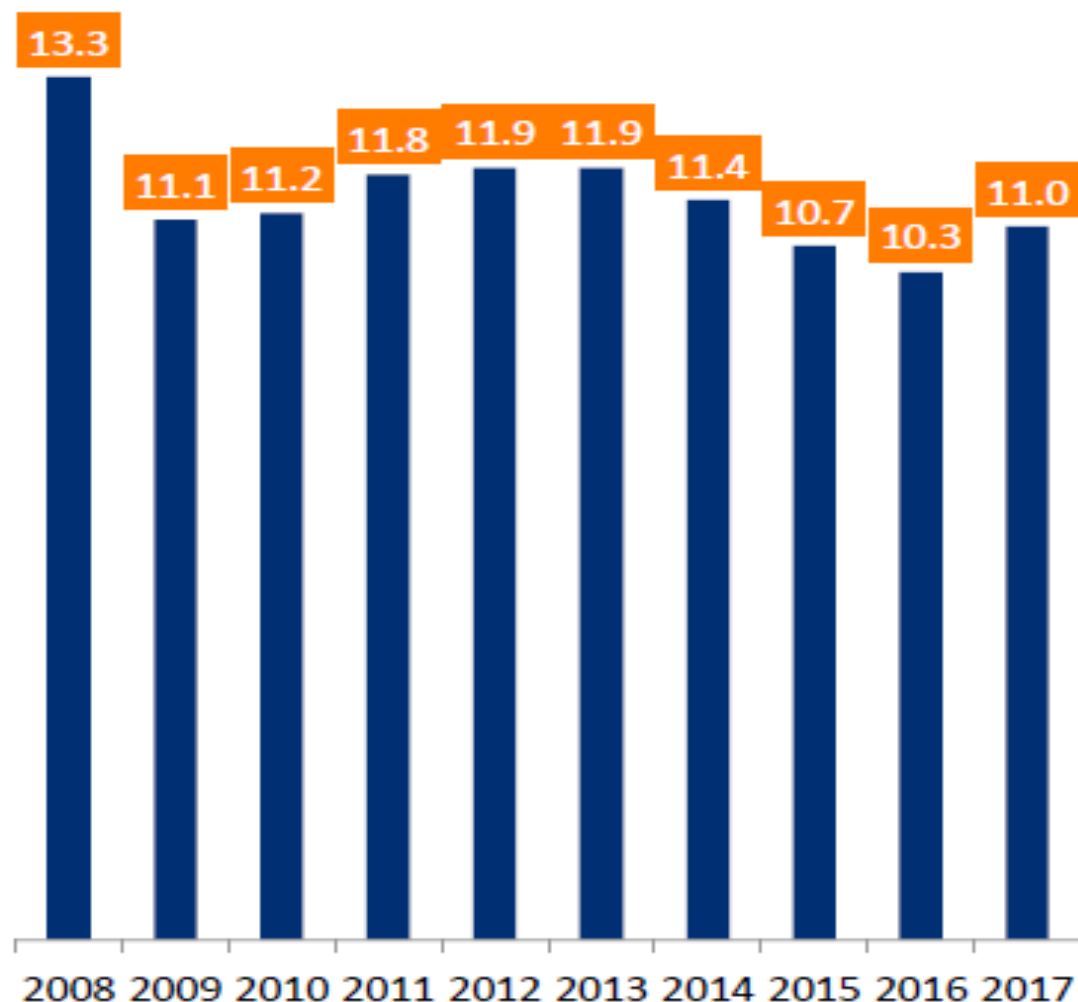
Belanja Negara



PAJAK ADALAH TULANG PUNGGUNG NEGARA

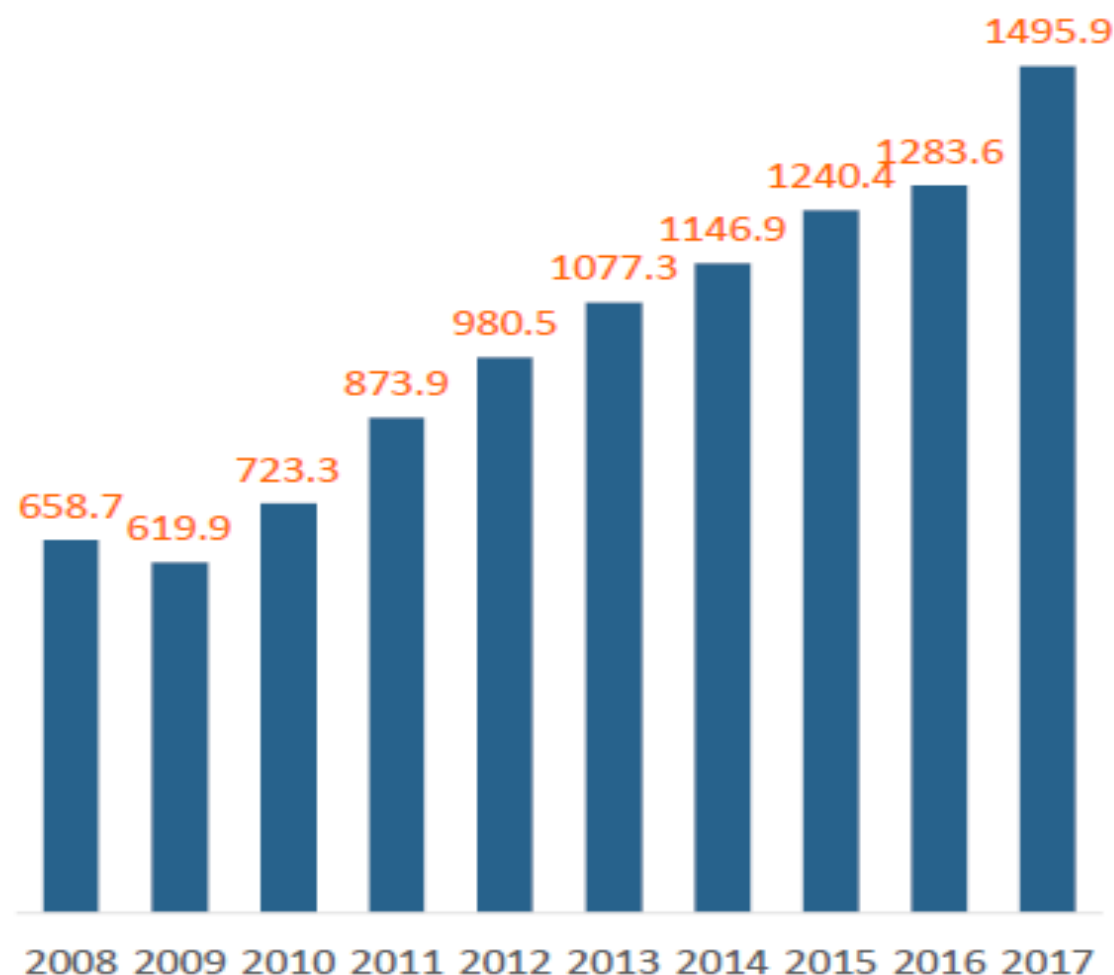
Sumber penerimaan utama dalam APBN

Tax Ratio Indonesia (%)



Sumber: Kemenkeu

Penerimaan Perpajakan (Rp Tn)



Sumber: Kemenkeu



PAJAK MEMILIKI FUNGSI REDISTRIBUSI

Namun pendapatan pajak masih terkonsentrasi di Jawa

Distribusi per Pulau

PULAU
PPh & PPN
Dana Transfer
Belanja APBD

KALIMANTAN
11,08 T (3,8%)
70,9 T (9,7%)
108,99 T

SULAWESI
9,13 T (3,1%)
73,8 T 10,1%)
85,81 T

PAPUA & MALUKU
4,77 T (1,6%)
144,7 T (19,7%)
64,86 T



PULAU
PPh & PPN
Dana Transfer
Belanja APBD

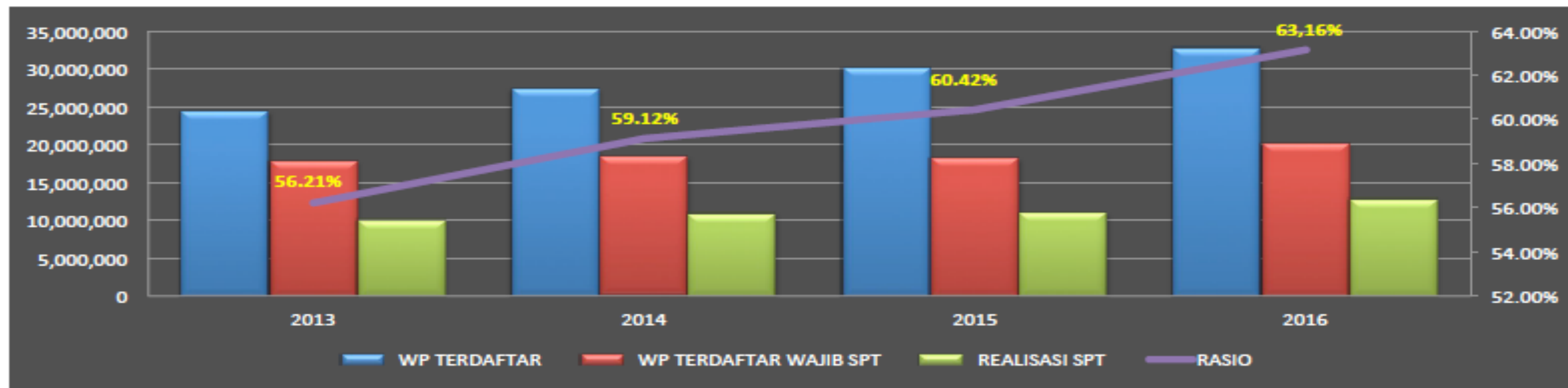
SUMATERA
25,75 T (8,8%)
207,3 T (28,3%)
322,51 T

JAWA
737,65 T (81,3%)
198,3 T (27,0%)
383,61 T

BALI & NUSA TENGGARA
3,96 T (1,4%)
38,8 T (5,3%)
53,74 T

KEPATUHAN PAJAK MASIH RENDAH

Jumlah Pegawai Pajak Juga Masih Terbatas



NO	URAIAN/TAHUN	2013	2014	2015	2016
1	WP TERDAFTAR	24.347.763	27.379.256	30.044.103	32.769.215
2	WP TERDAFTAR WAJIB SPT	17.731.736	18.357.833	18.159.840	20.165.718
3	TARGET RASIO KEPATUHAN (%)	65,00%	70,00%	70,00%	72,50%
4	TARGET RASIO KEPATUHAN - SPT (3 x 2)	11.525.628	12.852.301	12.711.888	14.620.146
5	REALISASI SPT	9.966.833	10.852.301	10.972.336	12.737.541
6	RASIO KEPATUHAN (5 : 2)	56,21%	59,12%	60,42%	63,16%
7	CAPAIAN RASIO KEPATUHAN (5 : 4)	86,48%	84,45%	86,32%	87,12%

Jumlah
Pegawai
pajak
39.980
orang

3.541m
jembatan



155 km
jalan



52.631 ha
sawah



11.900
rumah prajurit



9,4 ribu
gaji guru senior



10 ribu
Gaji Polri setahun



**infrastruktur
subsidi**



**belanja pegawai
bantuan sosial**



beras
729 ribu RTS



93 ribu ton
benih



306 ribu ton
pupuk



2,2 juta/
1,3 juta/1 juta
siswa SD/SMP/SMA



355 ribu
keluarga miskin



3,6 juta PBI
orang miskin

PENGUNAAN PENERIMAAN NEGARA PADA TRANSFER KE DAERAH & DANA DESA

6.765
ruang kelas SD



5.511
ruang kelas SMP



4.182
ruang kelas SMA



50
rumah sakit



23.585org
Tunj.prof guru setahun



24.911org
Tunj.khss guru setahun



**DAK Fisik
BOS**



**tunj.profesi guru
BOK**



1,25 juta
BOS siswa SD/
Ibtidaiyah setahun



1 juta
BOS siswa SMP/
Tsanawiyah setahun



714.286
BOS siswa SMA/
Aliyah setahun



2.018
BOK Puskesmas



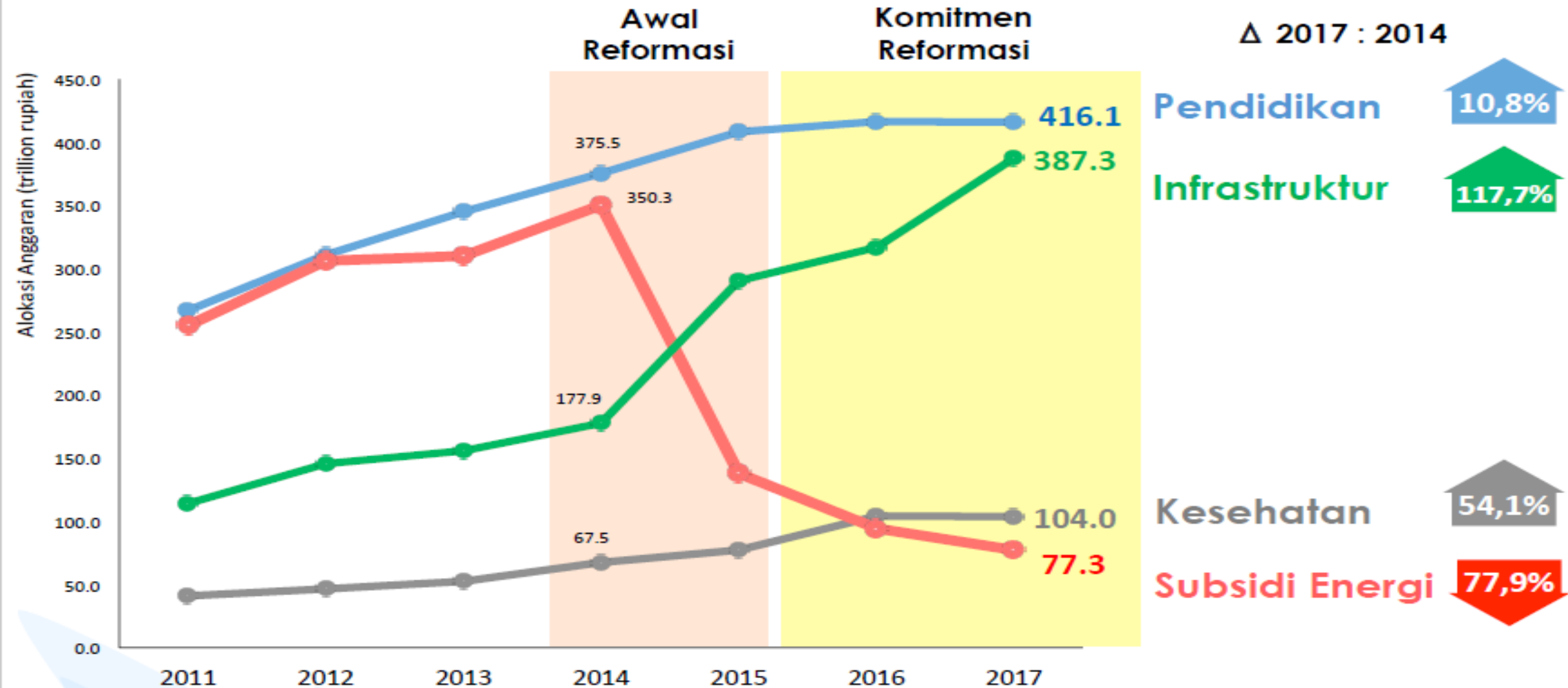
4,2 juta
Jampersal ibu hamil



2.144
Akreditasi RS



KUALITAS ALOKASI BELANJA MEMBAIK SEIRING PENINGKATAN BELANJA PRODUKTIF... namun efektivitas dan efisiensi belanja perlu terus diperbaiki



Sumber: MoF

INFRASTRUKTUR YANG HARUS DIBANGUN 2015-2019



- ▶ Jalan baru **2.650 Km**
- ▶ Jalan tol **1.000 Km**
- ▶ Pemeliharaan jalan **46.770 Km**



- ▶ Pembangunan Jalur **KA 3.258 km** di Jawa, Sumatera, Sulawesi dan Kalimantan (KA Antar kota 2.159 km; dan KA Perkotaan 1.099 km)



- ▶ Pembangunan **15 Bandara baru**
- ▶ Pengadaan **20 Pesawat Perintis**
- ▶ Pengembangan Bandara untuk pelayanan **Cargo Udara di 6 Lokasi**



- ▶ Pembangunan Pelabuhan Penyeberangan di **60 lokasi**
- ▶ Pengadaan **kapal penyeberangan (terutama perintis) sebanyak 50 unit**



- ▶ Pembangunan **24 Pelabuhan baru**
- ▶ Pengadaan **26 Kapal** Barang Perintis
- ▶ Pengadaan **2 Kapal Ternak**
- ▶ Pengadaan **500 unit kapal Rakyat**



- ▶ Pembangunan **BRT di 29 kota**
- ▶ Pembangunan angkutan massal cepat di kawasan perkotaan (6 Kota metropolitan, 17 Kota besar)

INFRASTRUKTUR YANG HARUS DIBANGUN 2015-2019



- ▶ Pembangunan **49 Waduk Baru** dan 33 PLTA
- ▶ Pembangunan/Peningkatan jaringan irigasi **1 Juta Ha**
- ▶ Rehabilitasi 3 Juta Ha Jaringan Irigasi



- ▶ Jangkauan Pital lebar/broadband di 100% kab/kota
- ▶ Indeks e-government mencapai 3,4 (skala 4,0)
- ▶ Pengembangan e-pengadaan, e-kesehatan, e-pendidikan, dan e-logistik



- ▶ Pembangunan sistem air limbah komunal di 227 kota/kab dan terpusat di 430 kota/kab
- ▶ Pembangunan IPLT untuk pengelolaan lumpur tinja perkotaan di 409 kota/kab
- ▶ Pembangunan TPA sanitary landfill dan fasilitas 3R di 341 kota/kab dan fasilitas 3R terpusat & komunal di 294 kota/kab
- ▶ Pengurangan genangan seluas 22.500 Ha di kawasan permukiman



- ▶ Pembangunan Rusanawa **5.257 Twinblok** (515.711 rumah tangga)
- ▶ Bantuan stimulan perumahan swadaya 5,5 Juta rumah tangga
- ▶ Penanganan kawasan kumuh 37.407 Ha
- ▶ Fasilitasi kredit perumahan untuk MBR 2,5 Juta rumah tangga



- ▶ Pembangunan SPAM di perkotaan 21,4 juta sambungan rumah (268.680 liter/detik)
- ▶ Pembangunan SPAM di perdesaan 11,1 juta sambungan rumah (22.647 desa)



- ▶ Pembangunan **2 kilang** minyak 2x300 ribu barrel
- ▶ Pembangunan FSRU **5** lokasi
- ▶ Jaringan gas kota sebesar **1 juta** sambungan rumah
- ▶ Pembangunan **SPBG 78 unit**
- ▶ Pembangkit listrik sebesar **35 ribu** MW
- ▶ Gas bumi untuk **600 ribu** nelayan
- ▶ Eksplorasi **minyak bumi** di laut dalam

PERKIRAAN KEBUTUHAN PENDANAAN RPJMN 2015-2019 (Triliun Rupiah)

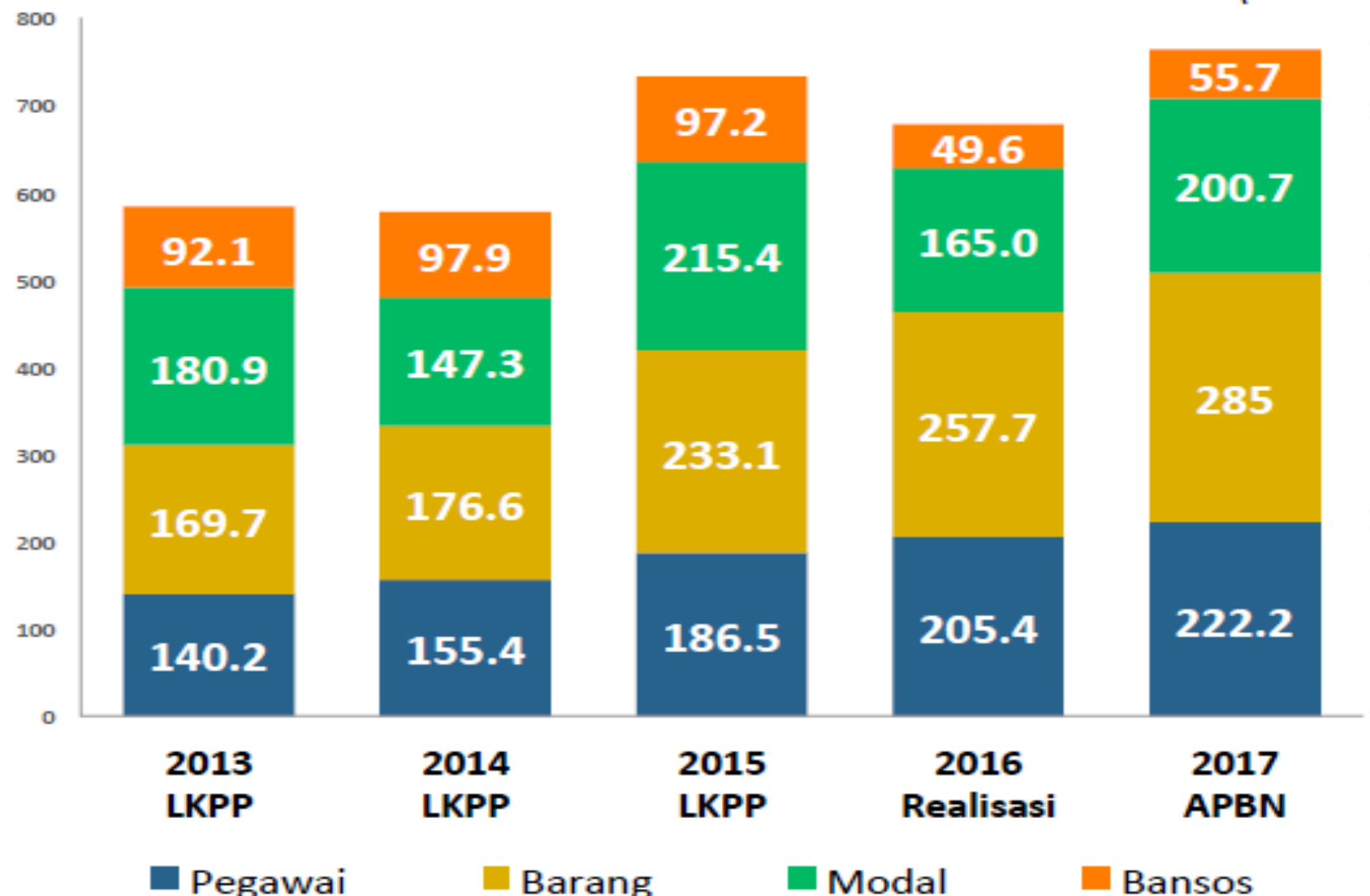
Sektor	APBN	APBD	BUMN	Swasta	Total
Jalan	340	200	65	200	805
Perhubungan Laut	150	-	11	122	283
Udara	498	-	238,2	163,8	900
Darat (termasuk ASDP)	50	-	10	-	60
Transportasi Perkotaan	90	15	5	5	115
Ketenagalistrikan	100	-	445	435	980
Energi (migas)	3,6	-	151,5	351,5	506,6
Teknologi Komunikasi dan Informatika	12,5	15,3	27	223	277,8
Sumber daya air	275,5	68	7	50	400,5
Air Minum dan Limbah	227	198	44	30	499
Perumahan	384	44	12,5	87	527,5
Total Infrastruktur	2.215,6	545,3	1.066,2	1.692,3	5.519,4

Sumber: Majalah SWA edisi 03/XXXIII/2-5 Februari 2017

PERTUMBUHAN ALOKASI BELANJA K/L DALAM APBN 2017 LEBIH REALISTIS, NAMUN ALOKASI BELANJA BARANG MASIH DOMINAN DAN BELANJA MODAL MASIH KECIL



% dari Belanja Pemerintah Pusat 2017
(non transfer ke daerah dan dana desa)



4,23%

15,25%

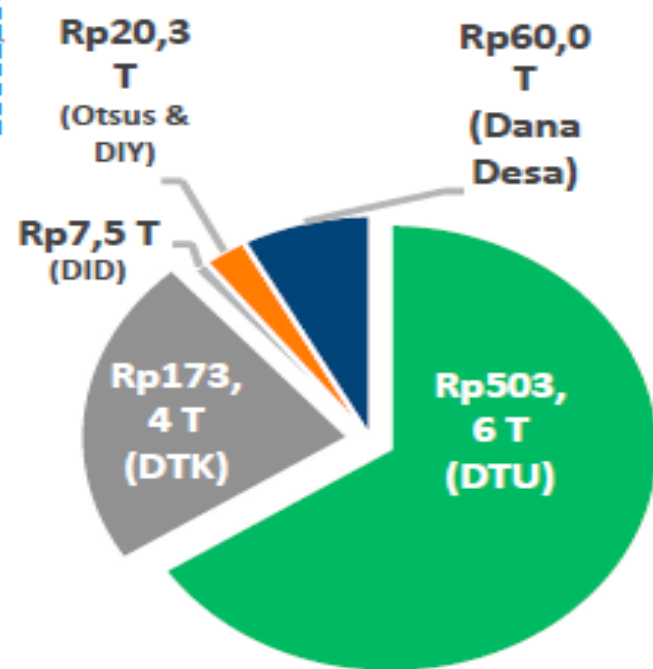
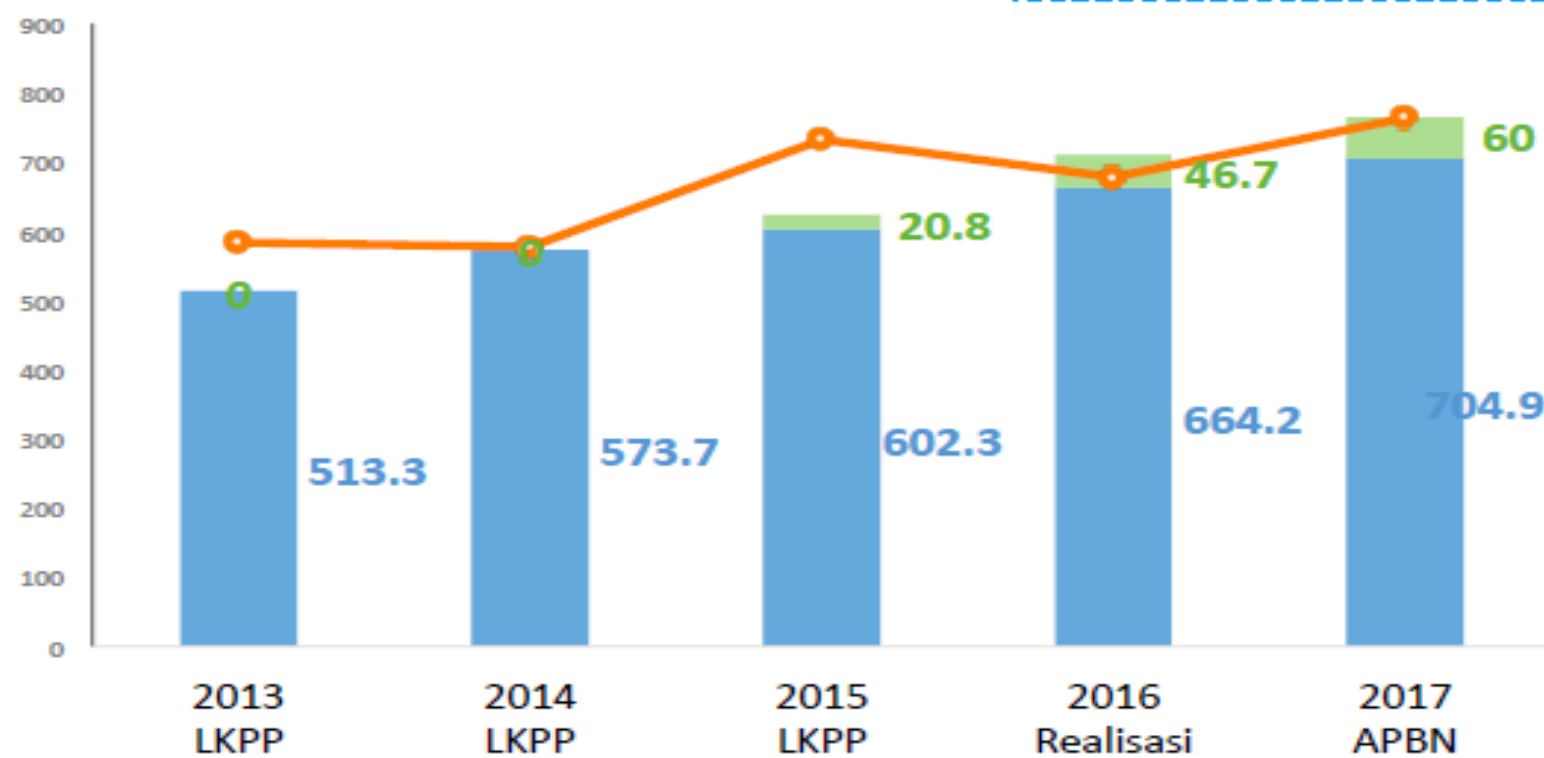
21,66%

16,89%

PENGUATAN DESENTRALISASI FISKAL

Perimbangan keuangan Pusat dan daerah semakin baik, namun tetap perlu perbaikan kualitas belanja di daerah

Total TKDD	513,3	573,7	623,1	710,9	764,9
Belanja K/L	582.9	577.2	732.1	677.6	763.6



UU APBN TA 2017
minimal 25% DTU untuk
belanja infrastruktur

■ Transfer ke Daerah ■ Dana Desa —●— Belanja Kementerian/Lembaga

DANA TRANSFER KE DAERAH

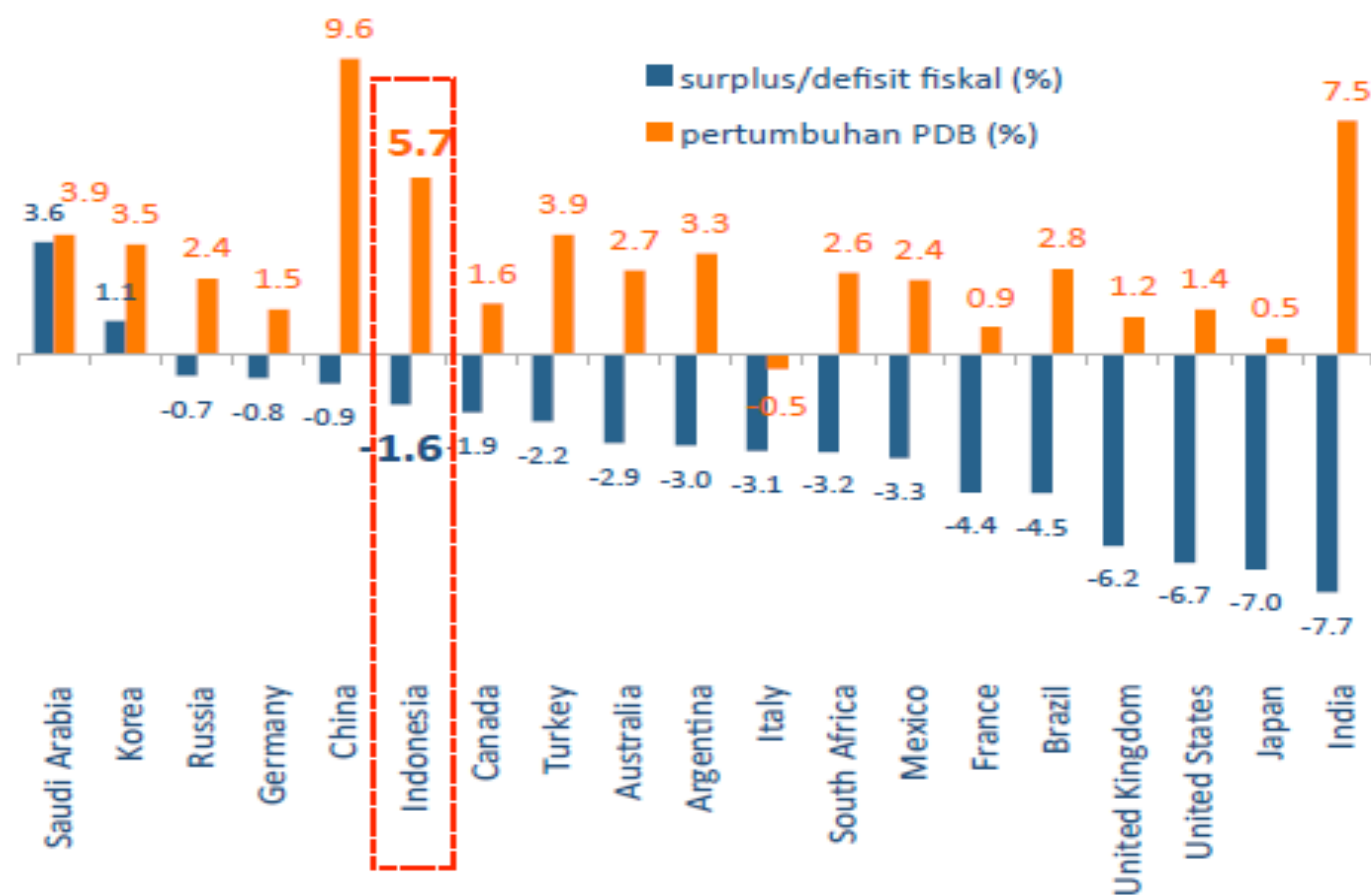
(Video Kemenkeu Dana Transfer Ke Daerah)



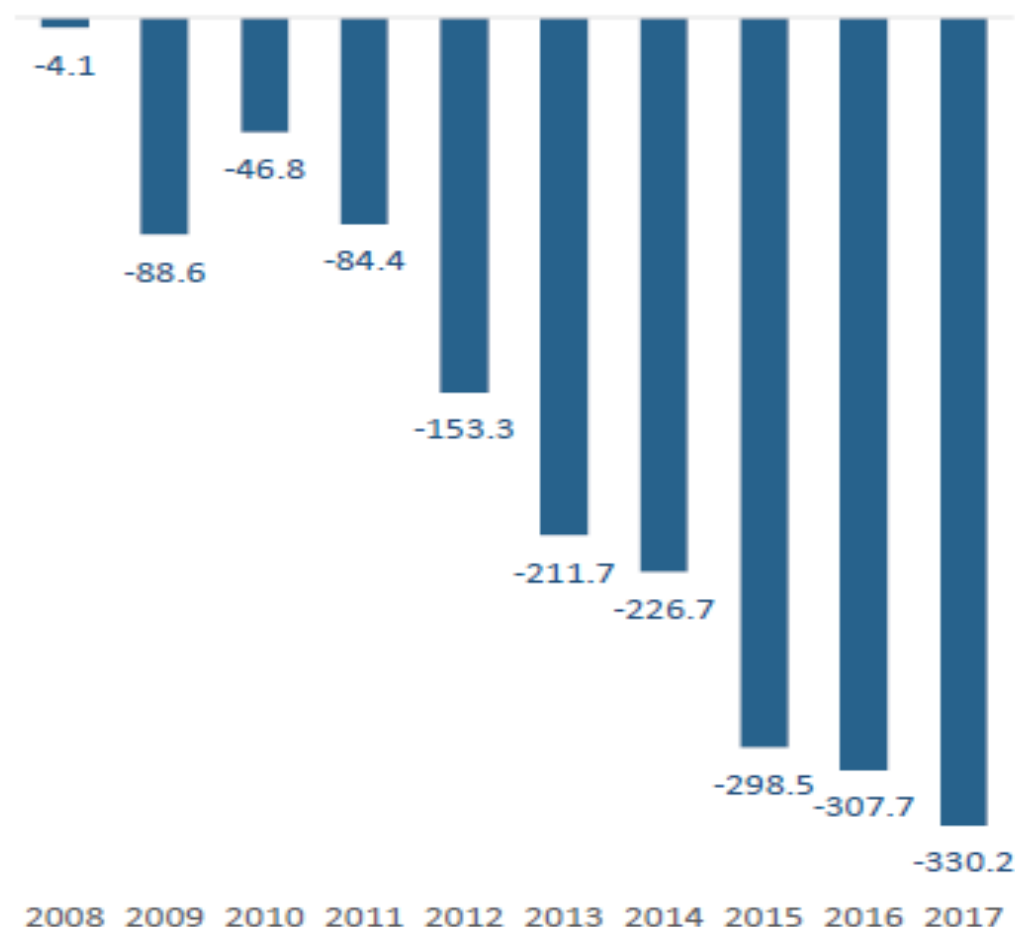
MENJAGA DEFISIT PADA TINGKAT YANG AMAN

dengan defisit dan utang yang rendah, pertumbuhan ekonomi Indonesia salah satu paling tinggi

Rata-rata defisit & pertumbuhan satu dekade terakhir



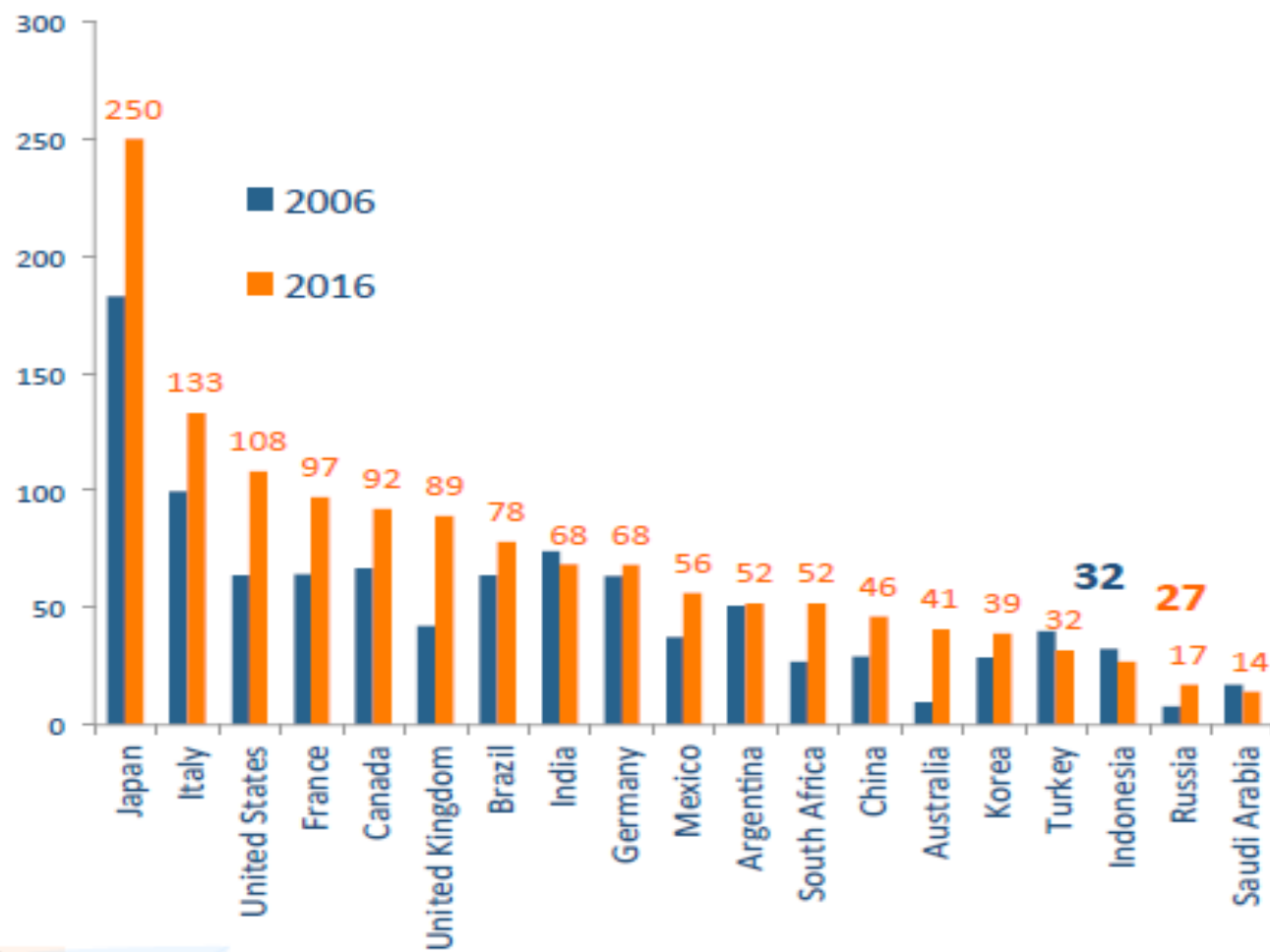
Defisit APBN (Rp Tn)



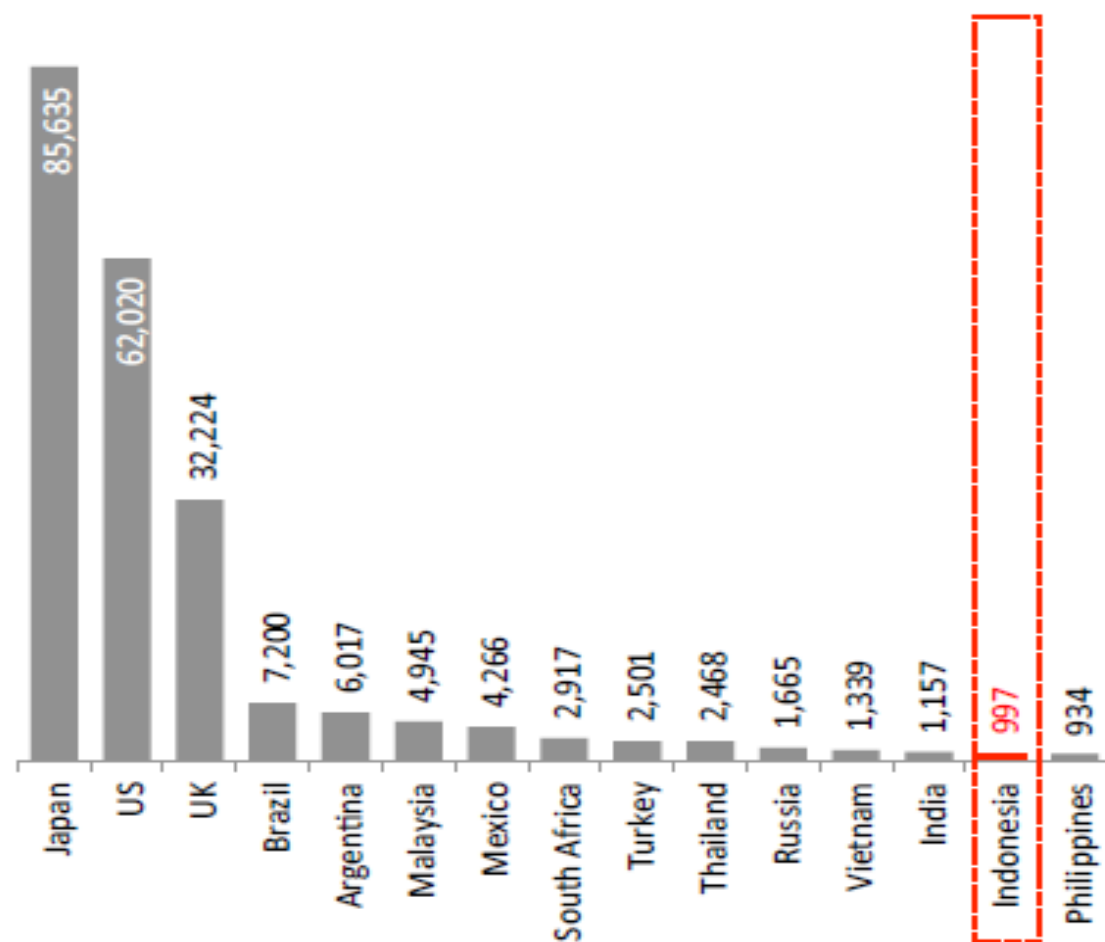
MEMPERKUAT PENGELOLAAN PEMBIAYAAN YANG PRUDEN

Tingkat utang publik Indonesia salah satu paling rendah

Rasio Utang terhadap PDB (%)



Utang Per Kapita (US\$)



INDONESIA DARURAT UTANG?

- Video Darurat Utang Kemenkeu



TANTANGAN PENGELOLAAN APBN



Penerimaan Proyeksi & Estimasi



Membuat estimasi penerimaan yang akurat dan kredibel



Peningkatan kapasitas mengumpulkan penerimaan negara



Rasio penerimaan perpajakan **masih rendah**

TAX
REFORM

Reformasi perpajakan
Sangat dibutuhkan



Belanja Komitmen



Membuat keputusan belanja yang strategis



Efektif dan **memperbaiki** fondasi Indonesia



Mengurangi kemiskinan, kesenjangan, dan **pemerataan** kesejahteraan



Memerangi inefisiensi dan korupsi



Pembiayaan Terus diperbaiki

Reformasi di Sektor Keuangan, antara lain melalui pendalaman pasar keuangan



Reformasi belanja
menuju efisiensi dan efektivitas

Memperkuat Reformasi Struktural untuk mendorong daya beli dan meningkatkan iklim investasi



1 9 Sept 15

- Deregulasi
- Akselerasi proyek strategis
- Mendorong pembangunan rumah bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR)

2 29 Sept 15

- Peluncuran program perizinan 3 jam
- Pembebasan PPN untuk industri transportasi
- Fasilitas logistik terintegrasi

3 7 Oct 15

- Penurunan harga BBM dan TDL
- Penyederhanaan izin investasi
- Perluasan basis penerima kredit UMKM

4 15 Oct 15

- Sistem upah yang simpel dan adil
- Kredit UMKM yang mudah dan terjangkau

5 23 Oct 15

- Penurunan pajak revaluasi aset
- Penghapusan pajak berganda REITs

6 5 Nov 15

- Pembangunan KEK
- Perbaikan suplai air bersih
- Penyederhanaan izin impor untuk farmasi

7 4 Dec 15

- Percepatan proses sertifikasi tanah
- Insentif pajak untuk industri padat karya

8 21 Dec 15

- One Map Policy
- Pembangunan pengolahan sumber daya alam (refinery)
- Insentif untuk industri penerbangan

9 27 Jan 16

- Percepatan konstruksi infrastruktur ketenagalistrikan
- Stabilisasi harga daging
- Deregulasi sektor logistik

10 11 Feb 16

- Perbaikan kemudahan berinvestasi (ease of doing business)

11 29 Mar 16

- Insentif kredit usaha REIT berbasis ekspor
- Indonesia Single Risk Mgmt (ISRM)
- Pembangunan industri farmasi

12 28 Apr 16

- Penyederhanaan izin, prosedur, durasi dan biaya memulai bisnis

13 24 Aug 16

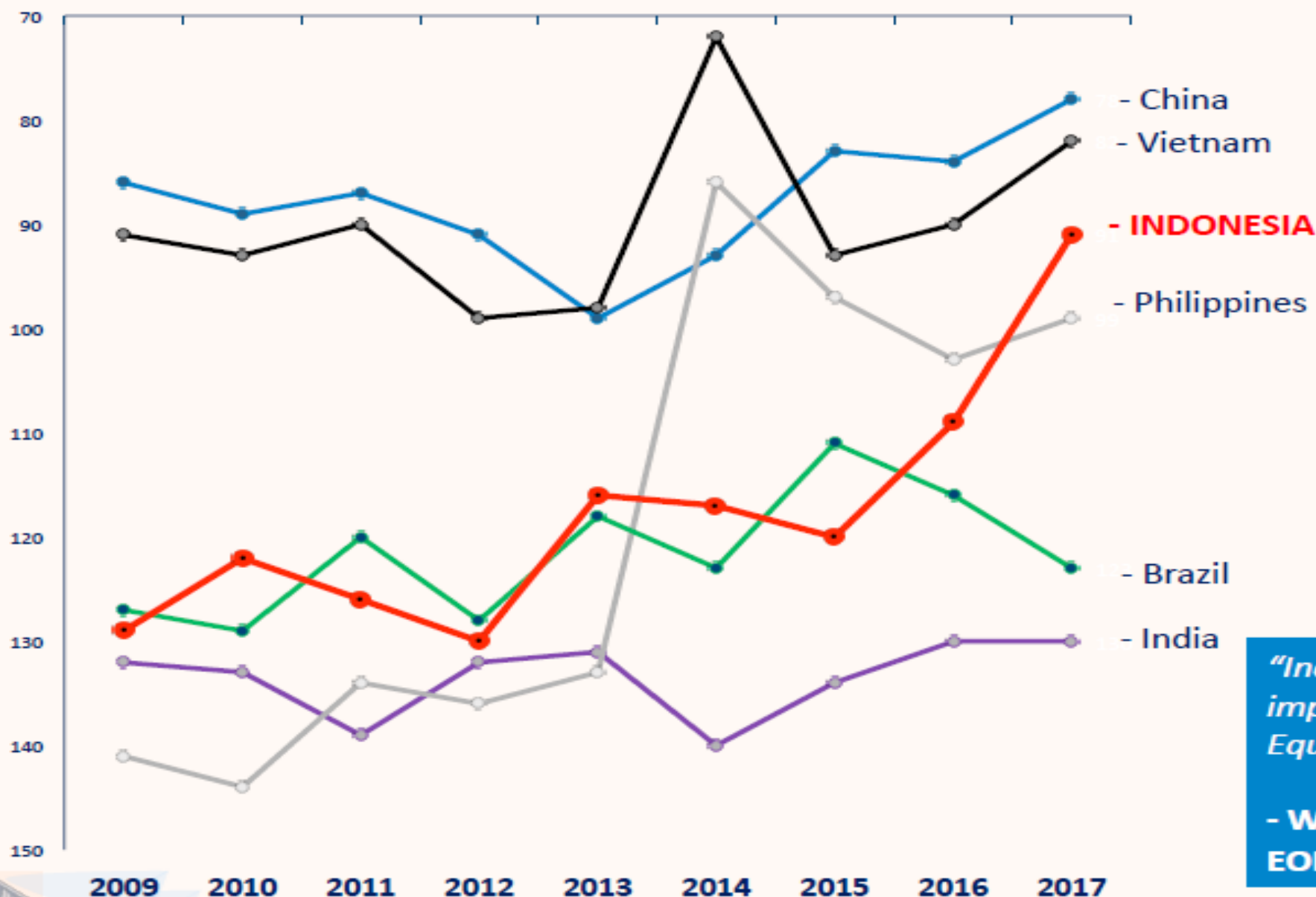
- Percepatan pembangunan rumah murah bagi MBR melalui kemudahan dan penyederhanaan proses perizinan

14 10 Nov 16

- Pembiayaan E-commerce
- Insentif pajak bagi pelaku usaha digital
- Perlindungan konsumen
- Perbaikan logistik



Pengakuan atas upaya reformasi Indonesia – Perbaikan signifikan posisi **Ease of Doing Business**



#91

Dari 190 negara

Skor: 61,5 (↑3,4)

Melonjak
15 peringkat

2016: #106
2015: #120

"Indonesia is amongst the top 10 improvers in Doing Business 2017: Equal Opportunity for All"

- World Bank Group, Press Release EODB 2017

TANTANGAN 2017

Ketidakpastian global



Tingkat permintaan yang lemah

Harga komoditas yang rendah

Economic rebalancing Tiongkok

Isu Geopolitik, e.g. Brexit

Kebijakan ekonomi AS di bawah pemerintahan baru

Kenaikan suku bunga The FED

Pembalikan arus modal dari EMEs



ASUMSI EKONOMI MAKRO	2016 Realisasi	2017 APBN	INDIKATOR KESEJAHTERAAN	2016 Realisasi	2017 Target
Pertumbuhan Ekonomi (% <i>, yoy</i>) IMF 5.1%, World Bank 5.3%, ADB 5.1%, Bloomberg Consensus 5.3%, Bank Indonesia 5,0 – 5,4%	5,0*	5,1	Tingkat Pengangguran (%) Angka Kemiskinan (%) Gini ratio (indeks) Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	5,61 10,70 0,397 70,1	5,3 – 5,6 9,5 – 10,5 0,38 70,11
Inflasi (% <i>, yoy</i>)	3,02	4,0	Kunci utama pertumbuhan: <ul style="list-style-type: none"> Memperkuat ekonomi domestik melalui stabilitas konsumsi, peningkatan investasi, dan ekspansi belanja pemerintah yang efektif Meningkatkan daya saing produk dalam negeri untuk mendukung perbaikan ekspor 		
SPN 3 Bulan (rata-rata %)	5,7	5,3			
Nilai Tukar Rupiah (Rp/US\$)	13.307	13.300			
ICP (US\$/barrel)	40	45			
Lifting Minyak (ribuan barrel/hari)	829	815			
Lifting Gas (setara dengan ribuan barrel minyak/hari)	1.184	1.150			

Postur realisasi APBN-P 2016 & APBN 2017

Deksripsi (Triliun Rupiah)		2016				2017	
		APBN-P	Outlook	Realisasi Sementara	Realisasi thd Outlook	APBN	Pertumbuhan thd realisasi 2016
A.	Pendapatan Negara	1.786,2	1.582,9	1.551,8	98,0%	1.750,3	12,8%
	I. Penerimaan Dalam Negeri	1.784,2	1.580,9	1.546,0	97,8%	1.748,9	13,1%
	1. Penerimaan Pajak	1.539,2	1.320,2	1.283,6	97,2%	1.498,9	16,8%
	2. PNBPN	245,1	260,7	262,4	100,7%	250,0	-4,7%
	II. Hibah	2,0	2,0	5,8	290,0%	1,4	-75,9%
B.	Belanja Negara	2.082,9	1.898,6	1.859,5	97,9%	2.080,5	11,9%
	I. Pemerintah Pusat	1.306,7	1.195,3	1.148,6	96,1%	1.315,5	14,5%
	1. Belanja Kementerian/Lembaga (K/L)	767,8	672,0	677,6	100,8%	763,6	12,7%
	2. Belanja Non K/L	538,9	523,3	471,0	90,0%	552,0	17,2%
	II. Transfer Ke Daerah dan Dana Desa	776,3	703,3	710,9	101,1%	764,9	7,6%
	1. Transfer Ke Daerah	729,3	659,1	664,2	100,8%	704,9	6,1%
	2. Dana Desa	47,0	44,2	46,7	105,7%	60,0	28,5%
C.	Keseimbangan Primer	(105,5)	(126,4)	(124,9)	98,8%	(109,0)	-12,7%
D.	Surplus/Defisit	(296,7)	(315,7)	(307,7)	97,5%	(330,2)	7,3%
	% terhadap PDB	(2,35)	(2,50)	(2,46)	98,4%	(2,41)	-2,0%
E.	Pembiayaan	296,7	315,7	330,3	104,6%	330,2	0,0%
	I. Pembiayaan Utang	371,6	387,8	n/a	n/a	384,7	n/a
	II. Pembiayaan Investasi	(94,0)	(91,5)	n/a	n/a	(47,5)	n/a
	III. Pembiayaan Lainnya	19,1	19,4	n/a	n/a	(7,0)	n/a₂₇



1

Akselerasi pembangunan infrastruktur, baik dari APBN, BUMN dan Swasta

2

Efektivitas Belanja daerah dan Dana Desa.

Untuk mengurangi kemiskinan
Menciptakan kesempatan kerja
Mengurangi kesempatan

3

Meningkatkan efektivitas dan efisiensi APBN guna mendukung ekonomi dan pembangunan inklusif



**Mendukung
Daya Beli**

- Gaji/Pensiun (2017: Rp343,4 T)
- Subsidi Masyarakat / transfer keluarga miskin (2017: Rp204,6 T)



**Investasi
membangun
produktivitas
dan daya saing**

- belanja infrastruktur (2017: Rp387,7 T)
- belanja pendidikan (20% APBN)
- belanja kesehatan (5% APBN)
- belanja riset/litbang (2017: Rp12,8 T)



**Membangun
institusi**

- belanja legislatif (DPR, DPD, MPR) (2017: Rp6,1 T)
- Yudikatif (MA, MK, Pengadilan seluruh Indonesia) (2017: Rp8,4 T)
- Eksekutif (Pusat, Pemda)



**Menjaga
stabilitas dan
keamanan**

- Belanja Kemhan/TNI (2017: Rp108 T)
- Belanja POLRI (2017: Rp84 T)

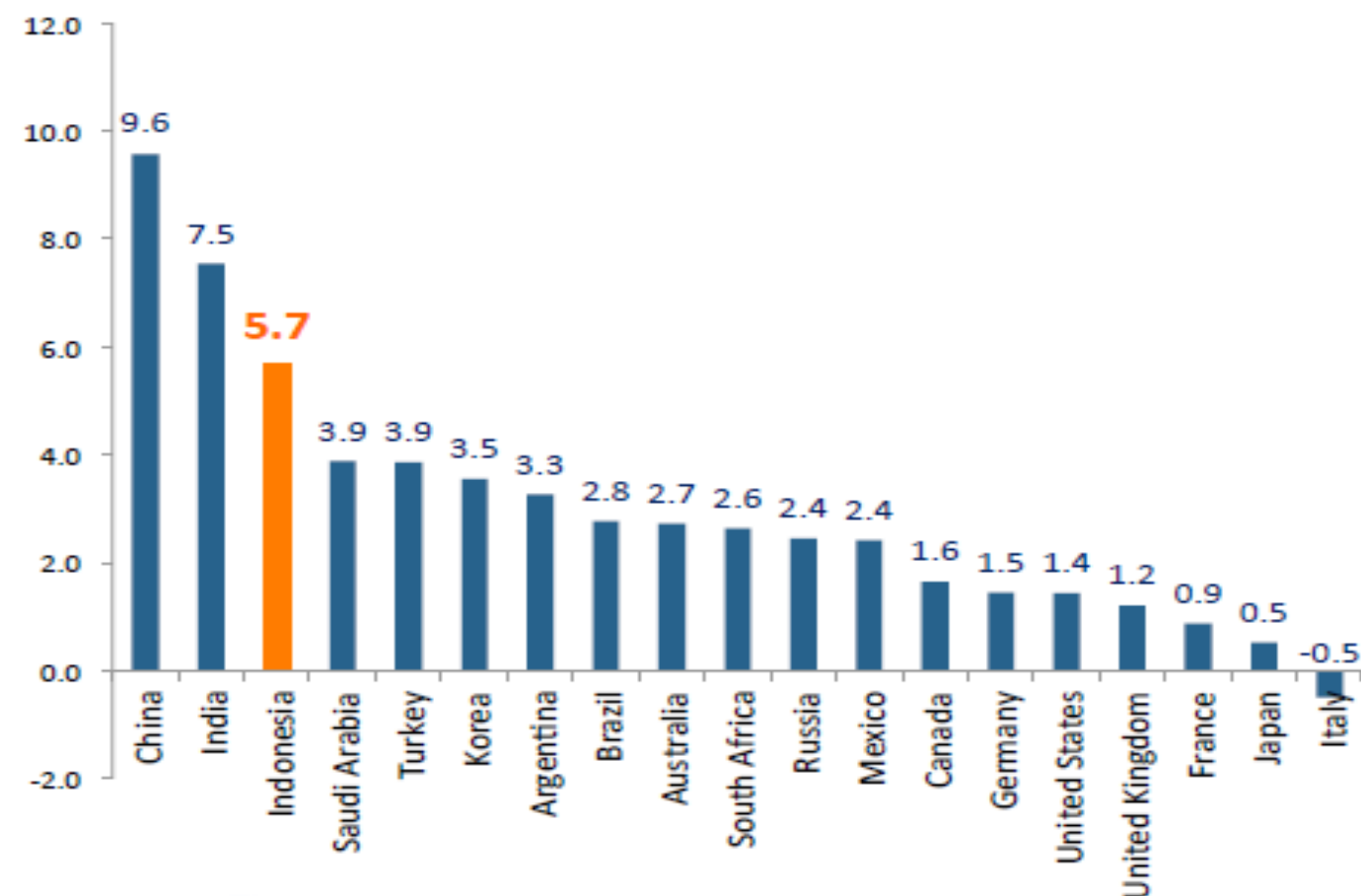




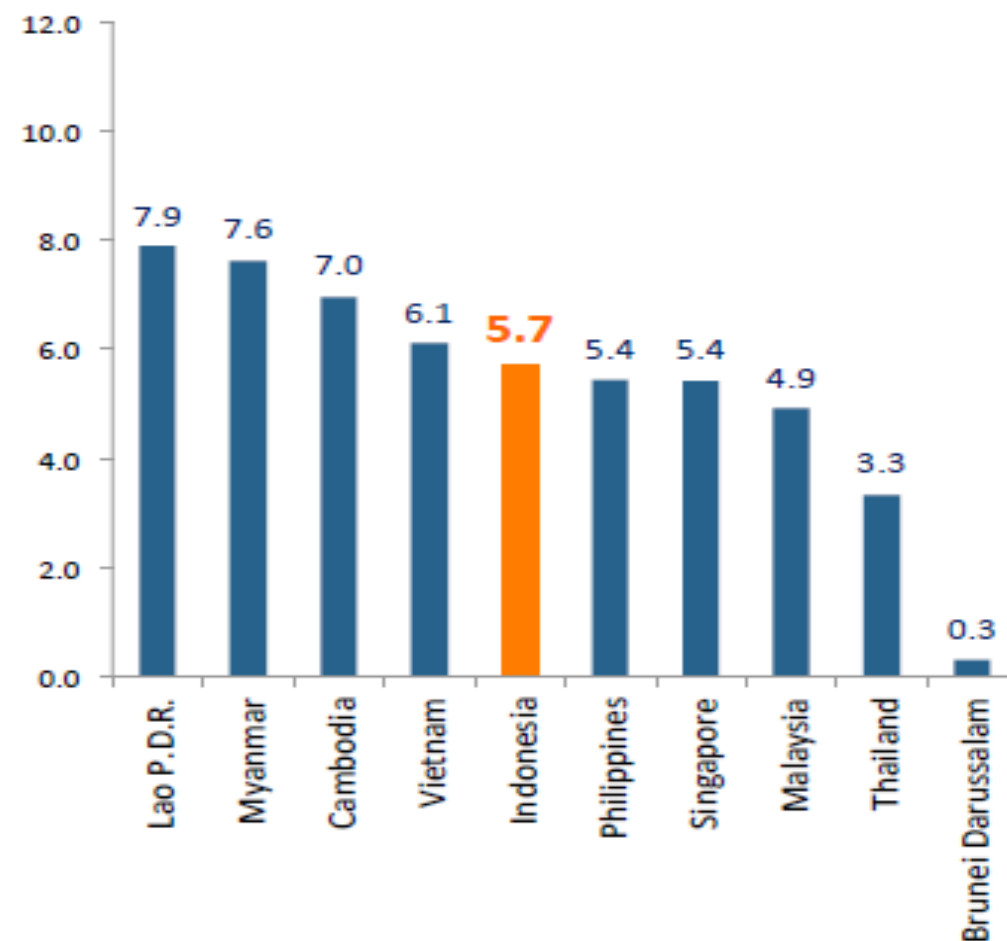
Pertumbuhan Ekonomi Indonesia MASIH LEBIH BAIK Dibandingkan Dengan Negara Lainnya di Dunia

Rata-rata pertumbuhan PDB satu dekade terakhir (% ,yoy)

Negara – Negara G20 & BRICS



Negara – Negara ASEAN



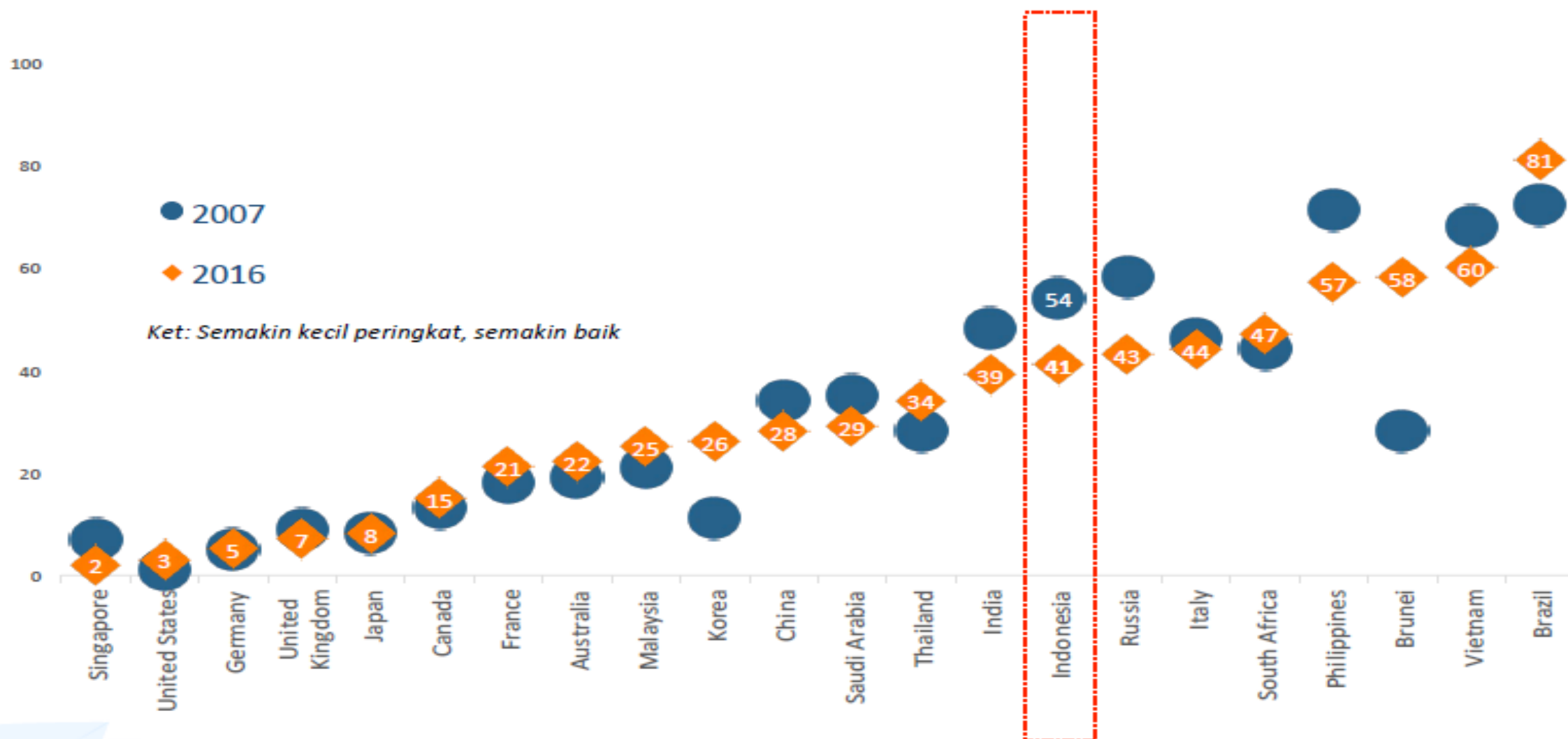
Sumber: IMF & BPS

Namun beberapa hal masih perlu untuk diperbaiki

a.l. DAYA SAING INDONESIA



Peringkat Global Competitiveness Index



Kebijakan Ekonomi yang Tepat Sasaran, Efektif, dan Berefek

Berorientasi kepada pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan

#1

Lembaga Pemerintahan yang Bersih, Transparan, dan Efektif

Mencakup lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif, baik di pusat maupun di daerah

#2

INDONESIA YANG ADIL DAN MAKMUR

#3

Keterbukaan Pikiran dalam Menerima Keragaman

Mencakup lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif, baik di pusat maupun di daerah

#4

Investasi Sumber Daya Manusia yang Berkualitas

Meningkatkan produktivitas dan daya saing SDM yang mampu berinovasi dan beradaptasi dengan perkembangan teknologi

You Are An Actuary

- If your friends always ask you how to calculate tips at restaurants
- If you have an opinion about calculators
- If you've ever discovered an error in a bill or bank statement and walked the institution through the solution
- If "basispoint" is a regular part of your vocabulary
- If your friends or family have trouble explaining what you do
- If you have trouble explaining what it is you do



Pusat Pembinaan Profesi Keuangan (PPPK)

Gedung Djuanda II lantai 19-20

Jl. Dr. Wahidin Raya No. 1, Jakarta Pusat

Telp. : (021) 3843237

Faks. : (021) 3508573

Email : pppk@kemenkeu.go.id

lapor.pppk@kemenkeu.go.id

Website : www.pppk.kemenkeu.go.id

Terima Kasih...